

PENGARUH PELAKSANAAN PEMBINAAN KUMKM TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM KABUPATEN NUNUKAN

Budi Haryanto¹, Djumadi², Aji Ratna Kusuma³

Abstract

This research aims to analyze the influence program enableness ofis UMKM(Climate Creation ofis Effort KUMKM, Development of Enterpreneurship and Excellence Kompetitif, Enableness ofis Effort Micro Scale) to growth Co-Operation, Micro Effort, Minimize and Middle on Duty Perindagkop and UMKM Nunukan Regency?

This Research Method use the approach survey with the quantitative descriptive research type and have the character of the eksplanatory. method of Intake sampel use the proportionate stratified random sampling (random withdrawal sampel proporsional have structure) bysampel as much 74 responder. Hypothesis examination use the doubled linear analysis regresi, with the test by simultan (Test F) and by parsial (Test t) what aim to to know the independent variable influence to variable dependen of at belief storey level 95% ($\alpha = 0,05$)

Result of hypothesis analysis indicate that the: Climate Creation ofis Effort KUMKM, Development of Supporter Systems ofis Effort KUMKM, Development of Enterpreneurship and Excellence Kompetitif, Enableness ofis Effort Micro Scale and Make-Up Of Quality of Co-Operation Institute have the influence which significant to growth KUMKM in Kab.of Nunukan with the storey level significantsi 0,000. coefficient Determinasi (R2 of equal to 47,20% and the rest 53,40% explained by other dissimilar factor is which do not join in this research. Result of test t (by parsial) that is: Climate Creation ofis Effort KUMKM, Development of Supporter Systems ofis Effort KUMKM, Development of Enterpreneurship and Excellence Kompetitif, Enableness ofis Effort Micro Scale and Make-Up Of Quality of Co-Operation Institute have an effect on by significant to growth KUMKM with the value Fhitung = 20,892 and Ftabel = 2,76.

Keyword :Program The, Co-Operation, Growth, New Enterpreneurship.

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

² Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan pembinaan KUMKM (Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Pemberdayaan Usaha Skala Mikro,) terhadap perkembangan KUMKM di Kabupaten Nunukan ?

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan bersifat eksplanatory. Metode pengambilan sampel menggunakan proportional stratified random sampling (penarikan sampel proporsional acak berstruktur) dengan sampel sebanyak 74 responden. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan uji secara simultan (Uji F) dan secara parsial (Uji t) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variable independen terhadap variabel dependen pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$).

Hasil analisis hipotesis menunjukkan bahwa: Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Pemberdayaan Usaha Skala Mikro mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan KUMKM di Kabupaten Nunukan dengan tingkat signifikansi 0,000. Koefisien determinasi (R^2 sebesar 47,20% dan sisanya 53,40% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini. Hasil uji t (secara parsial) yaitu: Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif bagi KUMKM, dan Pemberdayaan Usaha Skala Mikro berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan KUMKM dengan nilai $F_{hitung} = 20,892$ dan $F_{tabel} = 2,76$.

Kata kunci : Program, Koperasi, Perkembangan, Wirausaha Baru

Pendahuluan

Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia, dan memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi selama masa krisis. Kedudukan yang strategis sektor KUMKM tersebut karena mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar antara lain mampu menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel.

Sebagai gambaran secara umum strategi pemerintah negara lain untuk memajukan sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, seperti China, Malaysia dan Taiwan, dimana Koperasi dan UKM tidak hanya menangani usaha lokal tetapi juga sudah berskala internasional. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memberdayakan koperasi dinegaranya. Seperti Negara China, pemerintahnya mendatangi secara langsung pengusaha kecil

yang memiliki potensi yang kuat untuk maju, kemudian melakukan dukungan secara serius dari mulai ketersediaan modal, bantuan manajemen dan akses pasar. Pemerintah Taiwan, negara industri maju, yang menyokong pondasi usaha kecil dengan melakukan pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan sektor UKM dan Koperasi. Demikian juga dengan Malaysia dimana pemerintahnya secara serius memperhatikan Koperasi dan UKM baik secara regulasi, infrastruktur dan permodalan (Makmun, 2008).

Demikian halnya untuk daerah Kabupaten Nunukan tentang pertumbuhan Koperasi dan UKM dapat kita lihat pada Tabel I.1 dimana keberadaan Koperasi dan UMKM juga mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan pada periode 2010–2013.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Koperasi di Kabupaten Nunukan

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Koperasi	Unit	246	253	276	289
	a. Aktif	Unit	117	121	138	161
	b. Tidak Aktif	Unit	129	132	138	128
2.	Anggota	Orang	2.580	2.904	3.174	3.328
3.	Modal Sendiri	Rp.000	111.150	127.050	177.100	185.150
4.	Modal Luar	Rp.000	5.900	5.900	5.900	5.900
5.	Volume Usaha	Rp.000	515.379	208.684	347081	674.000
6.	Tenaga kerja	Orang	695	765	6.938	729
7.	SHU	Rp.000		4.086	3.137	3.217

Sumber Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Nunukan, 2014

Pada Tabel I.1 dapat dilihat pertumbuhan KUMKM di Kabupaten Nunukan tahun 2010, jumlah UKM sebanyak 2.580 menjadi 2.904 pada tahun 2011 dan meningkat lagi pada tahun 2012 menjadi 3.174 dengan jumlah tenaga kerja mencapai 3.217 jiwa pada tahun 2013. Dalam melaksanakan peran dan merealisasikan potensinya yang besar tersebut, KUMKM masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu diantaranya adalah masih kurang kondusifnya iklim usaha, yang mencakup : 1) aspek legalitas badan usaha dan ketidakjelasan prosedur perijinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; 2) praktek bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat; 3) ketidakpastian lokasi usaha; dan 4) lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan KUMKM. Disamping itu otonomi daerah ternyata belum menunjukkan kemajuan yang merata dalam upaya mempercepat tumbuhnya iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM. Hal ini misalnya tercermin dari masih terdapat daerah yang memandang KUMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan menggunakan pungutan-pungutan baru yang tidak perlu sehingga biaya usaha KUMKM meningkat. Oleh karena itu aspek kelembagaan masih menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dalam memperoleh daya jangkauan hasil dan manfaat yang semaksimal mungkin mengingat besarnya jumlah, keanekaragaman usaha dan tersebarnya KUMKM.

Namun demikian, meskipun pemerintah telah berupaya keras untuk melaksanakan suatu program pemberdayaan KUMKM dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan menggerakkan ekonomi kerakyatan, pelaku KUMKM masih belum dapat mengatasi berbagai hambatan dalam perkembangan usahanya. Untuk itu di perlukan suatu evaluasi program dan kebijakan yang telah dilaksanakan sehingga dapat diketahui sejauh mana program tersebut bermanfaat bagi pelaku KUMKM dalam pengembangan usaha. Dengan adanya evaluasi program/kebijakan pemerintah ini diharapkan pemerintah dapat menghasilkan suatu program pemberdayaan KUMKM yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dimasa yang akan datang, yang dapat menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6 persen per tahun, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat.

Kerangka Dasar Teori

Konsepsi Kebijakan dan Program

Sebelum melakukan analisis terhadap suatu kebijakan publik, penting sekali untuk memahami apa sesungguhnya definisi kebijakan publik itu sendiri. Untuk mendapatkan makna yang integratif dalam mendefinisikan kebijakan publik, umumnya para ahli akan mendeskripsikan terlebih dahulu pengertian dari kebijakan (*policy*).

Hogwood dan Gunn (1984, p.13) memberikan beberapa pengertian kata '*policy*' ("kebijakan") yang terbagi dalam beberapa kategori sebagai berikut :

1. Kebijakan sebagai label dari suatu aktivitas.
2. Kebijakan sebagai ekspresi dari tujuan yang bersifat umum.
3. Kebijakan sebagai usulan yang bersifat khusus.
4. Kebijakan sebagai keputusan pemerintah.
5. Kebijakan sebagai otoritas formal, yang dinyatakan dengan peraturan perundang-undangan ;
6. Kebijakan sebagai suatu program, yakni aktivitas pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan akhir yang lebih luas ;
7. Kebijakan sebagai *outcome*.
8. Kebijakan sebagai teori atau model.
9. Kebijakan sebagai suatu proses. Dengan suatu kurun waktu dapat dilihat kompleksitas suatu proses pembuatan kebijakan.

Eulau dan Prewitt (1973), sebagaimana dikutip dalam Jones (1991, p.47) dan Suharto (2006, p.7), mendefinisikan bahwa kebijakan sebagai "*a standing decision characterized by behavioral consistency and reventitiveness on the part of both those who make it and those who abide by it*" (suatu ketetapan yang berlaku, yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya). Lebih jauh Suharto juga menyitir Titmuss (1974), yang mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang

mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Pengertian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Guna memahami ekonomi koperasi secara komprehensif harus dikenali terlebih dahulu definisi koperasi yang sesuai dengan konsep ekonomi dan definisi tersebut dapat berlaku secara universal. Hal ini penting sebab koperasi akan berubah tergantung dari sudut mana dipandang. Dengan definisi yang sesuai, akan mampu menentukan karakteristik koperasi yang berlaku secara universal.

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak social sebagai usaha bersama berdasar asas-asas kekeluargaan dan gotong royong. Makna koperasi dipandang dari sudut organisasi ekonomi adalah suatu organisasi bisnis yang para pemilik/anggotanya dalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut.

Menurut Hendar dan Kusnadi, (2005), bahwa koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh anggota.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Gunawan (2007), mempunyai ciri utama: (1) pada umumnya dalam berusaha tidak memisahkan kedudukan pemilik dengan manajerial; (2) menggunakan tenaga kerja sendiri; (3) unbankable mengandalkan modal sendiri, (4) sebagian tidak berbadan hukum dan memiliki tingkat kewirausahaan yang relatif rendah. Kriteria lain menurut Bank Indonesia adalah: (1) kepemilikan oleh individu atau keluarga; (2) memanfaatkan teknologi sederhana dan padat karya; (3) rata-rata tingkat pendidikan dan keterampilan tergolong rendah; (4) sebagian tidak terdaftar secara resmi dan atau belum berbadan hukum serta; (5) tidak membayar pajak.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro dan mikro. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin.

Peran strategis KUMKM dalam perekonomian Kabupaten Nunukan dapat dilihat dari kontribusinya dalam pembentukan PDRB, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Selain itu pada masa krisis usaha mikro kecil dan menengah telah terbukti tangguh sebagai jaring pengaman perekonomian Kabupaten Nunukan. Ketika usaha besar tidak sanggup bangkit dari keterpurukan akibat ketergantungannya pada pinjaman luar negeri, KUMKM justru mampu mengangkat perekonomian dari keterpurukan yang semakin dalam.

Namun demikian masih terdapat berbagai faktor penghambat perkembangan koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang antara lain sebagai berikut : akses terhadap permodalan, pasar teknologi dan informasi, rendahnya kualitas SDM, belum optimalnya fungsi lembaga pemberdayaan KUMKM dan masalah iklim usaha yang belum sepenuhnya berpihak kepada KUMKM (Budhiretnowati, 2008)

Untuk mengatasi segala permasalahan yang dihadapi KUMKM, maka Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan perlu menerapkan manajemen strategi yang benar-benar efektif dan efisien untuk menetapkan program yang benar-benar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi KUMKM dalam pengembangan usaha. Dengan diterapkannya manajemen strategi yang tepat akan menghasilkan program-program pengembangan UMKM yang sesuai dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan yang tepat.

Dengan berpedoman pada manajemen strategi dan manajemen sumber daya manusia, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan khususnya Dinas Perindagkop dan UMKM telah melaksanakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) agar mampu menjadi pelaku utama dalam perekonomian nasional. Upaya dan langkah-langkah strategis pemberdayaan KUMKM akan terus dilaksanakan secara sistimatis, konsisten dan berkesinambungan pada masa mendatang. Untuk itu, perlu dikaji lingkungan strategis yang akan mempengaruhi proses pemberdayaan KUMKM yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop dan UMKM pada masa mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan. Kegiatan penelitian dari pengumpulan data hingga penulisan laporan akhir dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, dimulai sejak bulan Juni sampai dengan Agustus 2014.

Untuk tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian eksplanatori, yang merupakan suatu penelitian yang berusaha untuk mencari dan menjelaskan hubungan kausal (sebab akibat) antar variabel-variabel penelitian melalui suatu pertanyaan penelitian. pendekatan survey atau kuesioner (diuji dengan statistic) yang dilakukan pada ketua koperasi di Kabupaten Nunukan. Survei (kuesioner) adalah penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai alat pengumpulan data yang pokok dan secara umum menggunakan statistic (Singarimbun dan Effendy, 1995). dalam penelitian ini adalah ketua koperasi aktif yang ada di Kabupaten Nunukan yang berjumlah 268 koperasi

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan proporsional sample random sampling. Jumlah populasi sebanyak 268 koperasi yang diambil untuk penelitian sebesar 74 ketua koperasi dari jumlah populasi. Dari jumlah sampel tersebut sesuai dengan teknik pengambilan sampel sampel seperti yang tertera dalam tabel dengan tingkat kesalahan 10%. Jadi sampel tersebut telah mempunyai tingkat kepercayaan 90% terhadap populasi yang ada

Pada hipotesis ini terdapat 3 (tiga) variabel bebas (independent variable) yang digunakan, yaitu, Penciptaan Iklim Usaha KUMKM (X1), Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif (X2), Pemberdayaan Usaha Skala Mikro (X3). Sedangkan Variabel dependen adalah Perkembangan KUMKM (Y).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif. Alat analisis data yang digunakan adalah SPSS versi 16. SPSS (Statistical Package for Social Sciences) adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk menganalisa sebuah data dengan analisis statistika.

Alat uji statistik yang dipergunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda (Multiple Regression Analysis) untuk menguji variabel bebas (Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif bagi KUMKM dan Pemberdayaan Usaha Skala Mikro) terhadap variable terikat (perkembangan KUMKM).

Uji Validitas dan Realibilitas

Menurut singgih santoso (2000), ada dua syarat yang berlaku pada sebuah angket atau kuesioner, yaitu keharusan sebuah kuesioner untuk valid dan reliable. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Sedangkan suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban

seseorang terhadap pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu. Untuk lebih jelasnya validitas data dapat diukur dengan membandingkan r hasil dengan r table (r product moment) dimana jika :

- a. R hasil $>$ r table, data valid
- b. R hasil $<$ r table, data tidak valid

Sedangkan pengujian reliabilitas data yaitu dengan membandingkan r alpha dengan r table, dimana jika :

- a. R alpha $>$ r table, data reliable
- b. R alpha $<$ r table, data tidak reliable

Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (uji-F)

Uji F dilakukan untuk melihat secara bersama-sama apakah ada pengaruh dari variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3) yaitu Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif dan Pemberdayaan Usaha Skala Mikro terhadap perkembangan KUMKM yang merupakan variabel terikat.

Nilai Fhitung akan dibandingkan dengan nilai Ftabel dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu:

H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$.

H_0 ditolak (H_a diterima) jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$.

2. Uji t (Uji Secara Parsial)

Uji t bertujuan untuk melihat secara parsial apakah ada pengaruh dari variabel bebas, yaitu variabel Penciptaan Iklim Usaha KUMKM (X_1), Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif (X_2) dan Pemberdayaan Usaha Skala Mikro (X_3) terhadap variabel Perkembangan KUMKM (Y).

Nilai thitung dibandingkan dengan nilai ttabel. Kriteria pengambilan keputusan:

H_0 diterima jika $-thitung \leq thitung \leq ttabel$ pada $\alpha = 5\%$.

H_0 ditolak (H_a diterima) jika $thitung > ttabel$ pada $\alpha = 5\%$.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Setelah uji validitas terhadap data telah dikumpulkan maka hasilnya menunjukkan bahwa dari keenam variabel yang diuji adalah valid,

Karena nilai r hitung nya lebih besar dari pada r table (0,197). Karena data yang diperoleh didapat secara primer, maka uji validitas data dan reliabilitas data menjadi suatu uji yang harus dilakukan. Berkenaan dengan itu, maka untuk lebih jelasnya perhatikan table berikut ini :

Hasil Uji Validitas Data

No.	KODE	R	KETERANGAN
1	Y	.8044	Valid
2	X1	.3385	Valid
3	X2	.2982	Valid
4	X3	.8025	Valid

Setelah dilakukan uji validitas data, maka kemudian dilakukan uji reliabilitas data. Uji reliabilitas data dilakukan dengan membandingkan r alpha dengan r table (0,0197). Hasil pengujian menunjukkan bahwa r alpha data (0,8649) lebih besar dari data r.tabel (0,197). Dengan demikian seluruh data adalah reliable

Dengan kriteria pengambilan keputusan: H_0 diterima jika $-thitung \leq t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ dan ditolak H_0 jika $thitung < -t_{tabel}$ atau $thitung > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka sebagai berikut :

1. Pengaruh program penciptaan iklim usaha bagi Koperasi usaha mikro kecil menengah terhadap perkembangan Koperasi usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Nunukan ?

Hasil analisis *SPSS* menunjukkan nilai thitung 2,849 setiap variabel bebas. Nilai thitung akan dibandingkan dengan nilai ttabel pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Nilai ttabel (0,05;74) = 1,666. Pengaruh parsial dari variabel Program Penciptaan iklim usaha KUMKM (X1) dengan nilai thitung = 2,849. Dengan demikian thitung $>$ ttabel yaitu 2,849 $>$ 1,666, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa variable Program Penciptaan iklim usaha KUMKM (X1) berpengaruh secara parsial terhadap perkembangan KUMKM.

Berdasarkan hasil analisis *SPSS* diperlihatkan bahwa Program Penciptaan iklim usaha KUMKM (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan KUMKM dimana nilai koefisien Program Penciptaan iklim usaha KUMKM adalah 0,352. Tanda positif pada koefisien ini menunjukkan bahwa hubungan Program Penciptaan iklim usaha KUMKM dengan perkembangan KUMKM adalah searah (positif). Artinya jika Program Penciptaan iklim usaha KUMKM (pengesahan status badan hukum koperasi, pengurusan badan hukum usaha, klasifikasi koperasi, dan sistem penilaian koperasi berprestasi) bertambah pelaksanaannya maka KUMKM akan semakin berkembang, demikian sebaliknya.

Hal ini sejalan dengan hasil analisis deskriptif yang menyatakan bahwa program penciptaan iklim usaha KUMKM menurut responden sangat bermanfaat dalam perkembangan KUMKM. Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kondisi yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja KUMKM salah satunya melalui lingkungan usaha

yang kondusif. Pihak yang bertanggung jawab atas terciptanya iklim usaha yang kondusif adalah pemerintah melalui serangkaian regulasi dan kebijakan.

2. Pengaruh program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif bagi KUMKM terhadap perkembangan Koperasi usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Nunukan ?

Pengaruh parsial dari variable Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif (X2) diperoleh dengan nilai thitung sebesar 2,165. Dengan demikian thitung > ttabel yaitu $2,165 > 1,666$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa variabel Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif (X2) berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM.

Berdasarkan analisis SPSS diketahui bahwa Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif (X2) mempunyai pengaruh terhadap perkembangan KUMKM dimana nilai koefisien faktor Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif adalah 0,323. Artinya dengan meningkatkan kegiatan 0,323 maka KUMKM akan semakin berkembang, demikian sebaliknya.

3. Pengaruh program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro terhadap Perkembangan Koperasi usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Nunukan ?

Pengaruh parsial dari variabel Pemberdayaan Usaha Skala Mikro (X3) diperoleh dengan nilai thitung sebesar 2.153. Dengan demikian thitung > ttabel yaitu $2.153 > 1,666$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa variabel Pemberdayaan Usaha Skala Mikro berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM.

Berdasarkan analisis SPSS diketahui bahwa Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif (X3) mempunyai pengaruh terhadap perkembangan KUMKM dimana nilai koefisien faktor Pemberdayaan Usaha Skala Mikro adalah 0, 355. Artinya dengan meningkatkan kegiatan Pemberdayaan Usaha Skala Mikro maka KUMKM akan semakin berkembang, demikian sebaliknya.

Hal ini sejalan dengan hasil analisis deskriptif yang menyatakan bahwa Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro dinilai sangat bermanfaat bagi responden. Usaha skala mikro di Indonesia merupakan kegiatan usaha non-formal yang sangat signifikan jumlahnya dibandingkan dengan usaha skala kecil, menengah, dan besar

Kesimpulan

Dengan memperhatikan analisis pengaruh pelaksanaan pembinaan KUMKM terhadap perkembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Nunukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut ::

Program yang telah dilaksanakan oleh Dinas perindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan yang berupa program Penciptaan iklim usaha KUMKM, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif bagi KUMKM, dan pemberdayaan Usaha skala Mikro mempunyai pengaruh terhadap perkembangan Koperasi, Usaha Mikro kecil dan Menengah sebesar 47,20% sehingga dengan semakin membaiknya pelaksanaan ataupun realisasi dari program-program tersebut, maka akan semakin meningkatnya perkembangan KUMKM di kabupaten Nunukan.

Berdasarkan pengujian variabel yang berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM secara parsial, Penciptaan Iklim Usaha bagi KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif bagi UMKM dan Pemberdayaan Usaha Skala Mikro berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable Penciptaan iklim usaha bagi UMKM lebih dominan dibandingkan dengan variabel bebas lainnya dengan nilai thitung sebesar 2,849 dan nilai ttabel 1,666.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut:

1. Mengingat variabel penciptaan iklim usaha KUMKM yang paling berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM, hendaknya Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan untuk lebih meningkatkan program dan kegiatan pelayanan klasifikasi usaha bagi UMKM dan koperasi dengan system penilaian terhadap koperasi dan UMKM.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya menambah variabel-variabel lain yang mendukung perkembangan KUMKM, seperti peran lembaga keuangan mikro, peranan LSM dalam mengawasi pelaksanaan program pemberdayaan KUMKM dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Santoso, Singgih, (2001), Buku Latihan SPSS Statistik Non Parametrik, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.
- Gunawan, (2007). Peranan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi
- Eulan dan Prewit (1975). *Public Policy Making*. London : Thomas Nelson and Sons Ltd.
- Hogwood, B.W. and Gunn, L.A (1984). *Policy Analysis for The Real World*. New York : Oxford University Press.
- Howlett, M and Ramesh, M (2003). *Studying Public Policy. Policy Cycles and Policy*
- Kusnadi, dan Hendar. 2005. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi
- Singarimbun M, Sufyan Effendi, 1995. *Metode Penelitian Survei*, LPES Jakarta.

Sumber Lain:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Nomor . 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian